MUKADIMAH
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
e-Journal: http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd | e-mail: mukadimah@fkip.uisu.ac.id
sinta S5
ISSN: 2622-1373 (Online)
ISSN: 2614-1159 (Print)
Volume 5 | Issue 2
August 2021

MENINJAU ULANG NARASI BESAR DALAM BUKU SEJARAH TENTANG MOHAMMAD NATSIR PADA MASA PERCOBAAN DEMOKRASI INDONESIA, 1950-1957

Hafnita Sari Dewi Lubis* & Muhammad Ihsan Syahaf Nasution

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

The purpose of this article is to analyse M. Natsir's concept of a state, which, incidentally, was refused by the Indonesian government at the time. The concern is really what M. Natsir's actual role and political actions are in reviewing the grand narrative constructed into most history textbooks about his personality and controversial side. The historical method was used in this research. According to the findings of the study, M. Natsir, as a formulator of the Islamic idea on the basis of the Indonesian state, claims that Pancasila's position in Islam does not clash with Islamic values, and that Pancasila is even in line with the Qur'an. Additionally, he is a pioneer of Islamic education reform and was influential in reviving Indonesia through his famous "Integral" motion, which unifies several federated countries into the Republic of Indonesia.

Keywords: Grand narrative; the role of M. Natsir; Indonesian democracy.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis gagasan bernegara M. Natsir yang notabene tidak bisa diterima oleh pemerintah Republik Indonesia saat itu. Permasalahannya adalah bagaimana sesungguhnya peran M. Natsir dan sepak terjang politiknya untuk meninjau ulang narasi besar (*grand narrative*) yang dibangun dalam kebanyakan buku teks sejarah tentang sosoknya dan sisi kontroversialnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode sejarah. Hasil penelitian menemukan bahwa M. Natsir sebagai seorang perumus ide tentang Islam dalam dasar negara Indonesia memandang bahwa posisi Pancasila dalam Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan Pancasila sejalan dengan al-Qur'an. Selain itu, ia juga seorang penggagas pembaharuan pendidikan Islam dan berperan dalam menyelamatkan Indonesia dengan mosinya yang terkenal, yaitu "Integral" yang menyatukan beberapa negara federasi menjadi Republik Indonesia.

Kata Kunci: Narasi besar; peran M. Natsir; demokrasi Indonesia.

PENDAHULUAN

Perjalanan menuju Indonesia merdeka penuh dengan perjuangan, pergerakan dan revolusi yang diwarnai kekhawatiran konflik internal seperti tercermin dalam beberapa perdebatan antar tokoh. Namun sampai batas tertentu isu kemerdekaan Indonesia untuk sementara mampu membentuk kohesi antar berbagai golongan dan tokoh-tokoh perintis cita-cita Indonesia merdeka. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Banyak tokoh yang berperan penting dalam terciptanya kemerdekaan tersebut salah satunya adalah M. Natsir dengan Partai Masyumi yang didirikan atas keinginan Jepang dengan membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia pada 1943 (Ricklefs, 2008, p. 309). Pembentukan Masyumi mendapatkan sambutan dari rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Dengan melepaskan semua perbedaan baik yang bersifat pribadi maupun ideologi, seakan setiap orang berusaha memberi bantuan kepada kemerdekaan (Noer, 1987, p. 47).

Bertolak dari permasalahan negara Islam atau negara Indonesia yang berdasarkan Islam, mendesak dikemukakan bahwa Islam memang senantiasa mendasari cita-cita perjuangan Natsir. Pada tahun 1930-an sampai awal 1940-an telah terjadi polemik yang menarik antara Natsir dan

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-07-28 | Revised: 2021-08-02 | Accepted: 2021-08-04 | Published: 2021-08-05
HOW TO CITE (APA 6th Edition):
Lubis, H.S.D & Nasution, M.I.S. (2021). Meninjau Ulang Narasi Besar dalam Buku Sejarah tentang Mohammad Natsir pada Masa Percobaan Demokrasi Indonesia, 1950-1957. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. *5*(2), 201-207.
*CORRESPONDANCE AUTHOR: hafnitasari@unimed.ac.id | DOI: https://doi.org/10.30743/mukadimah.v5i2.4027
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (http://creativecommons.org/license/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Soekarno, dua tokoh yang sangat kontras tetapi memiliki kualitas intelektual yang hampir sama. Permasalahan di antara keduanya ialah pandangannya tentang Islam dan Nasionalisme (Waluyo, 2009, p. 8). Pemikiran keduanya terlihat dari karya Soekarno yang berjudul Islam Sontoloyo. Dalam buku tersebut Soekarno menyebutkan bahwa di zaman nabi belum ada sabun dan kreolin. Pada waktu itu nabi tidak bisa memerintahkan orang memaksa untuk memakai sabun dan kreolin. Gagasan Soekarno tersebut kemudian dibantah oleh M. Natsir dalam artikel Islam dan Akal Merdeka yang mengkritik pemahaman Islam Soekarno (Soekarno, 2015, pp. 176–186). Pemikiran Soekarno dan Natsir terhadap Islam saling berbeda. Keduanya saling membenarkan pendapatnya masing-masing.

M. Natsir kemudian aktif di Partai Masyumi, pada 1946, dalam kabinet Syahrir, ia diangkat sebagai Menteri Penerangan. Seperti diketahui bahwa, baru beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, Belanda ingin menjajah kembali wilayah yang dulunya merupakan jajahannya. Kemudian Belanda melakukan agresi militer pertama pada 1947 dan kedua pada 1948. Pada akhirnya, untuk menghentikan pertikaian kedua negara ini, Belanda berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara federasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Dengan demikian, Belanda lebih mudah melakukan politik *divide et impera*-nya (Iqbal, 2010, p. 220).

Menurut Natsir, pembentukan negara kesatuan harus dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik, baik antara negara-negara bagian maupun antara golongan masyarakat. Usul tersebut yang dikenal dengan "mosi integral (Noer, 1987)." Keberhasilan ini sekaligus menaikkan pamor Natsir menjadi seorang Perdana Menteri. Perlu diketahui bahwa pada 1950, Natsir berjasa menyelamatkan Republik Indonesia dengan mosi integralnya yang terkenal. Mosi ini berhasil menyatukan kembali Indonesia yang terpecah-pecah menjadi 17 negara bagian ke dalam Republik Indonesia.

Pada tahun 1950 secara resmi Indonesia kembali kepada negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer. Pada Tahun 1950 Presiden Soekarno menggunakan hak prerogatifnya menunjuk M. Natsir sebagai ketua Dewan Eksekutif Masyumi. Partai yang memiliki jumlah wakil terbanyak di Parlemen untuk bertindak sebagai formatur kabinet (Abibullah, 1996, p. 33). Namun Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada Tahun 1951 karena berselisih paham dengan Soekarno. Natsir juga mengkritik Soekarno yang kurang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya di luar Pulau Jawa. Sehingga Soekarno mendesak Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk menjatuhkan Kabinet Natsir, dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta.

Natsir menaruh harapan yang besar terhadap keberadaan lembaga-lembaga demokrasi yang telah ada dan dipilih rakyat, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara demokratis. Munculnya Piagam Perjuangan Menyelamatkan negara berupa tuntutan terhadap pemerintah pusat. Pada 1958, Perdana Menteri Djuanda mengumumkan keputusan pemerintah tentang penolakan terhadap tuntutan Padang. Dilanjutkan dengan pemutusan hubungan laut dan udara dengan Sumatera Utara (Waluyo, 2009). Pada akhirnya tuntutan tersebut tidak dipenuhi dan bahkan dijawab dengan gerakan militer. maka PRRI diumumkan oleh Dewan Perjuangan. Dalam Kabinet PRRI, Syaifuddin menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, M. Natsir sebagai Juru Bicara dan Burhanudin sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Keamanan. Selain itu banyak gagasan Natsir mengenai bernegara yang membuat pemerintah geram, ditambah dengan masuknya M. Natsir ke dalam Permesta.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah digunakan karena data yang digali berupa perkembangan masa lampau. Dalam metode penelitian sejarah, terdapat berbagai kemungkinan yang membuat sejarawan harus mampu menemukan data yang bebas dari prasangka, fakta harus jelas dan berbeda dari opini, bukti harus dapat diterima dari

saksi-saksi yang tidak berpihak, harus melalui proses analitis-kritis dan dapat dijaga objektivitasnya. Maka diperlukan metode yang tepat untuk memecahkan sebuah persoalan historis. Tahapan yang harus ditempuh melalui metode sejarah, antara lain pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013, p. 91). Dengan menggunakan metode sejarah, dapat dilihat kontribusi M. Natsir bagi negara Indonesia. ia merupakan seorang cendekiawan yang memiliki pemikiran yang tajam. Bahkan pemikirannya tersebut mendapatkan pertentangan dari Soekarno. Selain itu, metode ini digunakan guna untuk meninjau ulang narasi besar dalam buku sejarah tentang Mohammad Natsir pada masa percobaan demokrasi Indonesia, 1950-1957.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan bernegara Natsir

Pancasila telah hadir di dalam hubungan antara agama dan negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang maha esa" oleh karenanya hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya " serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Budyono, 2014, p. 410).

Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan budaya perlu mendiskusikannya terus menerus (Saifuddin, 2009). Ketegangan hubungan antara agama dan negara terjadi manakala di antara keduanya tidak terjadi hubungan yang simbiosis-mutualistis. Ketika negara tidak memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, atau sebaliknya agama menganggap negara menutup diri terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga tatanan kenegaraan berjalan secara bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan (Abdullah, 2014, pp. 22–23).

Perjalanan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia telah melahirkan banyak tokoh dengan berbagai macam aliran pemikirannya, contohnya adalah Soekarno dengan nasionalisnya, D. N. Aidit dengan komunisnya, M. Natsir dengan Islamnya. Beragamnya pemikiran tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti latar belakang agama, lingkungan dan cara pandang seperti yang dialami oleh M. Natsir.

Islam dan Pancasila dalam pandangan awal Natsir bukanlah suatu yang bertentangan, bahkan Pancasila dan Islam memiliki hubungan yang erat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan bagian kecil dari nilai-nilai Islam. Natsir juga mengatakan bahwa bukan berarti Pancasila itu Islam, namun Pancasila mengandung tujuan Islam. Pancasila akan hidup subur dalam Islam karena sila 1 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang akan menentukan berjalan atau tidaknya sila-sila selanjutnya akan tumbuh dalam Islam. Natsir juga berpendapat bahwa semua sila tidak akan ada artinya kalau sila Ketuhanan Yang Maha Esa hanya sekedar buah bibir saja bagi orang yang skeptis terhadap agama, di mana dalam langkahnya sila pertama tidak berjalan, maka sila-sila selanjutnya tidak akan berjalan karena pada hakikatnya sila pertama adalah urat tunggal bagi sila-sila selanjutnya sehingga Pancasila tersebut menjadi hampa dan tidak berbentuk, dan tinggal hanya kerangka Pancasila tersebut.

Namun pandangan Natsir tentang Pancasila berubah setelah tahun 1955. Sebelum tahun 1955 Natsir menerima dan bahkan membela Pancasila, namun setelah tahun 1955, Natsir menjadi orang yang menentang Pancasila. Polemik mengenai Pancasila sebenarnya sudah muncul pada tahun 1954,

ketika Soekarno memberikan kuliah umum di depan mahasiswa di Gubernuran Sulawesi, Makassar. Pandangan Soekarno terhadap Pancasila bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa diartikannya sebagai persatuan dengan Tuhan seperti diungkapkan dalam konsep Cinta Asih; Kedaulatan rakyat diartikannya sebagai *Panunggalan Kawula Gusti* atau bersatunya Tuhan dengan hamba-Nya; dan keadilan sosial menjadi cita-cita bangsa dan sistem tradisional gotong royong di masyarakat desa.

Perubahan sikap Natsir terhadap Pancasila dapat diketahui alasan perubahan yang terjadi dalam diri Natsir dalam memandang Pancasila sebagai dasar negara, sehingga dalam sidang Konstituante Natsir menentangnya dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Perubahan pandangan Natsir terhadap Pancasila, tidak terjadi begitu saja. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan pandangan Natsir mengenai Pancasila seperti faktor politik atau kondisi politik yang menyebabkan Natsir harus berhadapan dengan Pancasila karena Natsir membela Islam sebagai dasar negara.

M. Natsir merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat disegani di Indonesia dan dunia internasional melalui pemikiran, tindakan dan karya-karyanya. M. Natsir juga merupakan salah satu tokoh perumus ide tentang Islam sebagai dasar negara dalam salah satu sidang Konstituante yang membahas tentang dasar negara pada 11 November hingga 6 Desember 1957. Melalui idenya menjadikan Islam sebagai dasar negara yang kemudian mengakibatkan ia harus berhadapan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Kegigihan M. Natsir dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di sidang Konstituante serta penolakannya terhadap Pancasila mengakibatkan ia dituduh sebagai anti Pancasila. Pandangan Natsir mengenai Pancasila dan sikapnya yang menentang Pancasila sebagai dasar negara, tidak lepas dari kondisi dan situasi politik pada saat itu. Ada masa-masa M. Natsir mendukung Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno. Bagi Natsir nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga terdapat dalam nilai-nilai Islam, sehingga Islam dan Pancasila tidak bertentangan. Namun pandangan ini berubah ketika Natsir melihat adanya multitafsir dalam nilai-nilai Pancasila yang ditafsirkan oleh masing-masing orang (Sukri, 2019, pp. 82–96).

Pandangan Natsir mengenai posisi Pancasila dalam Islam, bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bahkan kelima nilai sila dalam Pancasila tersebut sejalan dengan al-Qur'an (Ansari, 1983, p. 41). Islam dan Pancasila dalam pandangan awal Natsir bukanlah suatu yang bertentangan, bahkan Pancasila dan Islam memiliki hubungan yang erat. Namun Natsir juga mengatakan bahwa bukan berarti Pancasila itu Islam, namun Pancasila mengandung tujuan Islam. Pancasila akan hidup subur dalam Islam karena sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang akan menentukan berjalan atau tidaknya sila-sila selanjutnya akan tumbuh dalam Islam (Ansari, 1983).

Pandangan Natsir tentang Pancasila berubah setelah tahun 1955, Natsir menjadi orang yang menentang Pancasila. Perubahan sikap Natsir terhadap Pancasila menurut Kholid O. Santosa disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) Pemikiran Soekarno yang menganggap bahwa Pancasila adalah konsep murni yang digali dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak berkaitan dengan Islam. Soekarno menunjuk Pancasila sebagai suatu pedoman yang sudah ada dalam buku Negarakertagama. Sehingga Natsir yang awalnya meletakkan Pancasila sebagai bagian dari sistem-sistem Islam, maka pada periode Konstituante, Natsir melihat Pancasila sebagai sistem Sekuler. (2) Pertentangan ideologi secara terbuka antara Masyumi dan Komunis, dan Natsir memandang bahwa paham komunis telah melanggar sila Ketuhanan Yang Maha Esa. (3) Terjadinya ketidakjelasan dan kekaburan fungsi dan posisi Pancasila (Santosa, 2004).

Melalui penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diketahui alasan-alasan perubahan M. Natsir dalam memandang Pancasila sebagai dasar negara, sehingga dalam sidang Konstituante Natsir

menentangnya dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Namun, pada hakikatnya, Natsir tidak menolak Pancasila tetapi menolak tafsir yang salah terhadap Pancasila. Perubahan-perubahan pandangan Natsir terhadap Pancasila yang menyebabkan Natsir harus berhadapan dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan Natsir membela Islam sebagai dasar negara, dan juga faktor nilai-nilai Islam yang dianut oleh Natsir yang menolak Pancasila ketika nilai-nilai Pancasila tidak dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Sosialisasi politik yang dirasakan Natsir baik sosialisasi langsung maupun tak langsung telah membentuk pandangan politik Natsir yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.

Sepak Terjang Natsir dan Peran Antagonis dalam Buku Teks Sejarah

Nama Mohammad Natsir begitu penting di era pergerakan nasional dan awal kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang di era 1930-an ini sering beradu pemikiran dengan Soekarno, ia merupakan tokoh yang selalu menginspirasi. Konsistennya memperjuangkan Negara Islam melalui Masyumi yang sudah sering kita dengar. Kali ini penulis mencoba meninjau kembali pemikiran-pemikiran beliau baik kiprahnya di bidang pendidikan, dakwah ataupun dalam kenegaraan. Ia dikenal sebagai pahlawan nasional yang kiprahnya dalam memajukan bangsa ini, khususnya umat Islam, di waktu lampau telah diakui oleh berbagai kalangan. Bahkan, pengaruh dari usaha beliau masih dirasakan hingga sekarang. M. Natsir tidak hanya dikenal sebagai sosok negarawan, pemikir modernis, mujahid dakwah. Akan tetapi, ia dikenal juga sebagai seorang aktivis pendidik bangsa yang telah menorehkan episode sejarahnya di Indonesia (Jatim, 2018, p. 122). Hingga pada akhirnya ia berkontribusi dalam menyatukan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Mosi Integralnya dan menjadi ketua Partai Masyumi (Mahfud, 2008, p. 8).

M. Natsir adalah seorang tokoh yang menggagas pembaharuan pendidikan Islam yang berbasis al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan berbasis al-Qur'an dan al-Sunnah, maka pendidikan Islam harus bersifat integral, harmonis, dan universal, serta mengembangkan segenap potensi manusia agar menjadi manusia yang bebas, mandiri sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Konsep pendidikan yang integral, harmonis dan universal tersebut oleh Natsir dihubungkan dengan ajaran Islam sebagai agama yang bersifat universal. Berdasarkan latar belakang dapat dilihat bahwa kehidupan Mohammad Natsir dan peranan dalam dunia pendidikan dan perpolitikan di Indonesia (Jatim, 2018).

Pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan Islam berfungsi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam hal karakter, sikap moral serata penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan ciri pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam yang integral tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Intinya pendidikan Islam, berfungsi membina dan menyiapkan anak didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan tinggi.

Melihat konsep pendidikan M. Nasir, bahwa kemajuan yang dicapai oleh pendidikan Islam tidak diukur dengan penguasaan atau supremasi atas segala kepentingan duniawi saja, akan tetapi melihat sampai kehidupan duniawi memberikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Asas pendidikan Islam menurut Natsir adalah tauhid. Ajaran tauhid manifestasinya adalah pembentukan kepribadian, dan merupakan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan yang didasarkan oleh prinsip tauhid dalam rangka menghambakan diri kepada Allah s.w.t., terletak pada *shahadah*. *Shahadah* sendiri jika dilihat dari sisi pendidikan tidak lain adalah suatu pernyataan pembebasan dari segala macam belenggu yang diciptakan oleh manusia. Pendidikan dalam Islam adalah proses yang dilakukan oleh manusia secara sadar dalam membimbing manusia menuju kesempurnaan berdasarkan Islam (Ali, 1999, p. 65).

Sepak terjang M. Nasir juga terlihat ketika ia terjun ke dunia politik. Natsir memulai karier politiknya dengan mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Politik Islam pada tahun 1938. Pada tahun 1940-1942 berkat perjuangannya, ia diangkat sebagai ketua partai cabang di Bandung. Ia juga diangkat sebagai pegawai sebagai kepala biro pendidikan di Bandung, sekaligus merangkap sebagai sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Puncak kariernya adalah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Ketua Partai Masyumi, Menteri Penerangan, dan juga menjadi Perdana Menteri RI pada pemerintahan Soekarno. Ketika Sutan Syahrir menjabat sebagai perdana menteri, ia dipilih sebagai Menteri Penerangan. Jabatan sebagai Menteri Penerangan dipegang sebanyak tiga kali, dua kali dalam Kabinet Syahrir dan satu kali dalam Kabinet Hatta.

M. Natsir tidak saja dikenal sebagai seorang yang punya andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi ia juga memiliki peran dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Mosi Integralnya. Pada tahun 1950 Natsir mengangkat mosi pada sidang parlemen Republik Indonesia Serikat yang dikenal dengan mosi integral Natsir. Mosi tersebut menyatukan Republik Indonesia yang telah terpecah belah menjadi beberapa negara bagian, kemudian Indonesia kembali kepada Republik Indonesia (Jatim, 2018).

Pada tahun 1958, Natsir dianggap terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dibentuk di Sumatera Barat. Pemerintahan tandingan ini dimunculkan sebagai reaksi dan protes atas kebijakan Soekarno yang telah menyeleweng dari UUD 1945, bukan karena ingin mengambil kekuasaan. PRRI muncul bermula ketika Soekarno mengangkat dirinya sebagai formatur kabinet, padahal sistem politik pada saat itu yang menganut sistem demokrasi parlementer.

Pemberontakan PRRI/Permesta adalah tantangan daerah paling serius yang pernah dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Latar belakang munculnya pemberontakan Permesta karena kekecewaan terhadap kesejahteraan daerah. Daerah luar Jawa menjadi penghasil utama bahan ekspor, tetapi pemerintah pusat hanya dapat memanfaatkannya. Maka timbullah kecenderungan yang oleh Permesta dijuluki "Sentralistik". Selain itu Permesta menolak dominasi PKI menjadi alasan selanjutnya, para tokoh pendiri dan pejuang PRRI/Permesta menentang kebijakan dan aspirasinya dengan melakukan aksi dengan cara tidak mengakui pemerintahan yang sah di Indonesia pada saat itu. Namun pada akhirnya PRRI berhasil dilumpuhkan oleh militer atas perintah pemerintah pusat. Akibat keterlibatannya dengan PRRI, maka Natsir ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara pada tahun 1960. Begitu pun dengan Partai Masyumi yang dibubarkan karena para anggotanya juga termasuk ke dalam bagian dari PRRI (Saefuddin, 2003, pp. 5–6).

Setelah menjadi tahanan yang dikarenakan keikutsertaannya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), ia masih tetap memberikan kontribusi bagi negara seperti yang ia lakukan di masa Orde Baru ketika Natsir memperbaiki hubungan Indonesia dengan Arab Saudi, ikut andil dalam menyelesaikan masalah Timor Timor dan kegiatan lain yang membantu pemerintahan Orde Baru (Dzulfikriddin, 2010, pp. 156–158). Ia bahkan menerima berbagai penghargaan internasional atas pengabdiannya terhadap dunia Islam. (Sukri, 2019). Meskipun ia berkontribusi bagi Indonesia, terlepas dari tindakan kontroversinya yang ikut dalam PRRI yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1966, M. Natsir dibebaskan dari penjara setelah pemerintahan dipegang oleh Orde Baru. Sejak itulah, perjuangan politik Natsir berakhir (Saefuddin, 2003).

SIMPULAN

M. Natsir perumus ide tentang Islam sebagai dasar negara. Pemikirannya justru berseberangan dengan tokoh lainnya. Menurutnya, posisi Pancasila dalam Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bahkan Pancasila sejalan dengan Al-Qur'an. Pancasila belum tentu Islam, namun Pancasila mengandung tujuan Islam. Ia juga seorang penggagas pembaharuan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berfungsi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Natsir juga berjasa menyelamatkan Republik Indonesia dengan Mosi Integralnya yang menyatukan beberapa negara federasi menjadi Republik Indonesia. Walaupun ia berjasa dalam menyatukan Indonesia, namun ketidakpuasannya terhadap pemerintah, ia terlibat dalam PRRI. Ia menganggap kebijakan Soekarno tidak sejalan dengan UUD 1945 dan pembangunan di tiap-tiap daerah tidak merata. Menurutnya pemikiran Soekarno yang menganggap bahwa Pancasila adalah konsep murni yang digali dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak berkaitan dengan Islam. Soekarno menunjuk Pancasila sebagai dasar negara. Akan tetapi Natsir menentangnya dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Sehingga ia ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Meskipun demikian, ia masih tetap memberikan kontribusinya bagi bangsa, salah satunya dengan memperbaiki hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Selain itu, ia juga menerima berbagai penghargaan internasional atas pengabdiannya terhadap dunia Islam. Beberapa kontribusi Natsir bagi negara Indonesia, terlepas dari tindakan kontroversinya yang ikut dalam PRRI.

REFERENSI

Abdullah. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks keindonesiaan. *Jurnal Politik Profetik*, *4*(2).

Abibullah, D. (1996). *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ali, H. N. (1999). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ansari, E. S. (1983). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustaka Salman.

Budyono. (2014). Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(3), 410.

Dzulfikriddin. (2010). *M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia, Peran dan Jasa M. Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: Mizan.

Iqbal, M. (2010). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Jatim. (2018). Gagasan Kebangsaan Mohammad Natsir dan Kontribusinya dalam Pemikiran Keslaman. *El-Furqania*, *4*(2).

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Mahfud. (2008). Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita. *Seminar Refleksi 58 Tahun Mosi Integral M. Natsir-Merawat NKRI Menghempang Potensi Disintegrasi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi.

Saefuddin, D. (2003). *Pemikiran Modern dan Post Modern Islam*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Saifuddin, L. H. (2009). *Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila*. Yogyakarta: PSP Press Universitas Gadjah Mada.

Santosa, K. O. (2004). *Mohammad Natsir Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Sega Arsy.

Soekarno. (2015). *Islam Sontoloyo*. Bandung: Sega Arsy.

Sukri, M. A. (2019). Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir. *Al Fuad Journal*, *3*(1).

Waluyo. (2009). *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional*. Yogyakarta: Ombak.

Copyright Holder **©Hafnita Sari Dewi Lubis & Muhammad Ihsan Syahaf Nasution** | Copyright Year **2021**
Licence URL **https://creativecommons.org/licenses/by/4.0**